



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SOEKARWO

Jabatan : GUBERNUR JAWA TIMUR

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Surabaya, 12 Oktober 2016

Menyetujui

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja	1 Persentase penduduk yang bekerja	95,97
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,04
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	3 Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	20,00
3	Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	4 Angka rata-rata lama sekolah	8,80
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,96
		6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86,70
		7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	62,11
		8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	112,84
		9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	102,45
		10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	80,90
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	11 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,64
5	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	12 Persentase kualifikasi guru menurut ijazah \geq Sarjana/ Pasca Sarjana	67,34
6	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	13 Persentase pemuda berprestasi yang dibina	20,73
		14 Persentase atlet berprestasi yang dibina	13,73
7	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata	15 Rasio tenaga medis per 1.000 satuan penduduk	18,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan	16 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	97,25
		17 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	25,61
9	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	18 Angka Harapan Hidup (AHH)	70,82
10	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	19 Persentase masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	15,00
11	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)	20 Persentase cakupan peserta KB aktif	65,00
12	Menurunnya persentase penduduk miskin	21 Persentase penduduk miskin	11,72
13	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	22 Persentase penurunan PMKS	1,42
14	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	23 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20,00
		24 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	69,00
		25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,02
15	Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi	26 Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)	54,85
16	Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	27 Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	9,25
17	Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	28 Rasio perputaran modal Kopwan	2,20
		29 Prosentase koperasi aktif	80,13
18	Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)	30 Pertumbuhan sub-sektor tanaman bahan makanan terhadap PDRB (%)	1,96
		31 Pertumbuhan sub-sektor tanaman perkebunan terhadap PDRB (%)	2,10
		32 Pertumbuhan sub-sektor peternakan terhadap PDRB (%)	4,38

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		33 Pertumbuhan sub-sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	6,90
		34 Pertumbuhan sub-sektor perikanan terhadap PDRB (%)	4,80
19	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (<i>food availability</i>)	35 Ketersediaan pangan (ton) <ul style="list-style-type: none"> - Beras - Jagung - Kedelai - Daging - Telur - Susu - Ikan - Gula 	7.780.579 6.474.225 490.417 362.861 352.216 415.521 1.465.727 1.316.966
20	Meningkatnya penyerapan pangan (<i>food utilization</i>)	36 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,40
		37 Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (kg/Kap/Th)	85,00
		38 Tingkat keamanan pangan (%)	81,00
21	Meningkatnya akses pangan (<i>food access</i>)	39 Stabilisasi harga beras di tingkat konsumen (coefisien variasi/CV) (%)	10,00
22	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	40 Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	9,54
23	Meningkatnya kontribusi sektor industri	41 Pertumbuhan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	6,60
24	Meningkatnya kunjungan wisata	42 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	368.626,00
		43 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	45.824.051,00
25	Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal	44 Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman	205,00
		45 Indeks Kepuasan terhadap penyelenggaraan gelar seni budaya di Jawa Timur	79,00
26	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah	46 Jumlah minat investasi PMA berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	60,72
		47 Jumlah minat investasi PMDN berdasarkan ijin prinsip (trilyun rupiah)	49,38

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		48 Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	41,40
		49 Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM (trilyun rupiah)	42,92
		50 Jumlah nilai realisasi PMDN non fasilitas (trilyun rupiah)	94,28
27	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara	51 Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap fungsional (%)	88,60
		52 Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan (%)	57,90
		53 Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	47,00
		54 Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan	43,00
		55 Prosentase kabupaten/ kota berpredikat Wahana Tata Nugraha	55,00
		56 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang	81,00
28	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	57 Persentase tingkat pelayanan air bersih (%)	63,96
		58 Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah (%)	65,97
		59 Persentase pelayanan drainase perkotaan (%)	82,12
		60 Persentase capaian layanan persampahan perkotaan (%)	85,48
		61 Persentase rusun terbangun	49,11
29	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan	62 Persentase Luas areal layanan irigasi (ha)	98,02
		63 Rasio/ kinerja jaringan irigasi	68,40
		64 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku	87,89

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	65 Penurunan luas genangan banjir (ha)	75,73
30	Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	66 Rasio ketersediaan listrik	72,53
		67 Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,61
31	Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi	68 Luas konservasi kawasan hutan (ha)	10.000,00
32	Meningkatnya sumber mata air terkonservasi	69 Jumlah titik sumber mata air yang terkonservasi	5,00
33	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut	70 Persentase titik pantau dengan peningkatan kualitas air	33,00
34	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	71 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO ₂)	4,00
35	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	72 Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	69,23
		73 Jumlah rencana rinci tata ruang Kabupaten/ Kota	7,00
		74 Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	25,00
		75 Prosentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang	75,00
36	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	76 Jumlah SKPD provinsi yang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	25,00
37	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	77 Hasil EKPPD	ST

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian serta pembangunan dan program kegiatan	78 Penilaian SAKIP	A
39	Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	79 Jumlah raperda inisiatif dewan	3,00
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	80 Opini BPK	WTP
41	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	81 Persentase SKPD yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sesuai ketentuan	20,00
42	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	82 Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)	100,00
43	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	83 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	5,466
44	Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	84 Persentase kerusuhan bermotif SARA yang ditangani	100,00
45	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib	85 Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	100,00
46	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	86 Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100,00
47	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	87 Persentase kejadian terkait HAM yang ditindaklanjuti	100,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
48	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung hukum	88 Jumlah ormas/ LSM yang terdaftar	910,00

Program	Anggaran (Rupiah)
A. Belanja Langsung (ex. Rutin)	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	288,137,389,988
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	457,952,586,349
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	148,458,134,162
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	59,671,200,518
B. Belanja Langsung (ex. Pembangunan)	
1. Urusan Wajib	
a) Pendidikan	
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini	9,148,114,500
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembiliah Tahun	33,216,132,400
3) Program Pendidikan Menengah	58,415,696,100
4) Program Pendidikan Non Formal	10,626,000,000
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	66,843,000,000
6) Program Pendidikan Tinggi	2,313,803,000
7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	3,101,160,000
b) Kesehatan	
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14,848,461,500
2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4,550,000,000
3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2,100,000,000
4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1,200,000,000
5) Program Upaya Kesehatan Perorangan	1,495,170,000
6) Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3,550,000,000
7) Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	5,438,695,578
8) Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	40,574,000,000
9) Program Pengendalian Penyakit	4,600,000,000

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	841,852,798,400
11) Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2,130,516,885,616
c) Pekerjaan Umum	
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1,200,000,000
2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	593,554,803,385
3) Program Dukungan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2,150,000,000
4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan	-
5) Program Konservasi Sumber Daya Air	10,152,731,000
6) Program Pendayagunaan Sumber Daya Air	141,397,561,465
7) Program Pengendalian Daya Rusak Air	12,440,710,580
8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	4,127,871,000
9) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	36,450,129,000
d) Perumahan	
1) Program Pengembangan Perumahan	99,108,789,000
e) Penataan Ruang	
1) Program Perencanaan Tata Ruang	2,083,790,000
2) Program Pemanfaatan Ruang	1,961,844,000
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	454,366,000
f) Perencanaan Pembangunan	
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6,074,376,000
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5,872,436,175
3) Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	8,150,000,000
4) Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	6,378,980,325
5) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	6,680,144,000
6) Program Perencanaan Pembangunan Pembiayaan Pembangunan	6,046,250,000
7) Program Perencanaan Pembangunan Pengembangan Regional	8,000,000,000
8) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Kemasyarakatan	5,198,039,500
g) Perhubungan	
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	106,297,032,000
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	26,579,000,000
3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	24,214,099,000
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	83,852,500,000

5)	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1,790,000,000
6)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	55,184,626,049
7)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	45,080,774,951
8)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Laut	108,048,000,000
9)	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Udara	24,000,000,000
10)	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi	34,450,560,000
h)	Lingkungan Hidup	
1)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	41,984,850,000
2)	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	7,650,000,000
3)	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1,425,000,000
4)	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	1,125,000,000
i)	Kependudukan dan Catatan Sipil	3,000,000,000
1)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
j)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1)	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	682,337,000
2)	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	909,393,000
3)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1,560,543,000
4)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	771,270,000
k)	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
1)	Program Pelayanan Kontrasepsi	85,000,000
2)	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	115,000,000
3)	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	253,000,000
4)	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	847,000,000
l)	Sosial	
1)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,525,000,000
2)	Program Pemberdayaan Sosial	4,202,000,000
3)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	5,080,000,000
4)	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	1,665,000,000
5)	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	3,270,000,000

6)	Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	1,857,500,000
7)	Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial	59,124,618,317
m)	Ketenagakerjaan	
1)	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	3,500,000,000
2)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	134,459,210,000
3)	Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	10,760,000,000
4)	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	16,850,000,000
n)	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
1)	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	3,756,872,100
2)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	24,851,869,000
3)	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	30,384,894,670
4)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	20,829,962,000
5)	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	6,112,935,230
6)	Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	12,372,762,000
o)	Penanaman Modal	
1)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	4,970,000,000
2)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3,489,000,000
3)	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	1,170,000,000
4)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	9,400,000,000
5)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,000,000,000
p)	Kebudayaan	
1)	Program Pengembangan Nilai Budaya	2,129,096,500
2)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	10,363,030,600
3)	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	24,512,103,500
q)	Kepemudaan dan Olah Raga	
1)	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	9,462,754,300
2)	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	12,890,580,000
r)	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
1)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	156,277,100
2)	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2,000,000,000
3)	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	160,000,000
4)	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	250,000,000

5)	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	250,000,000
6)	Program Perbaikan Proses Politik	90,000,000
7)	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	93,722,900
8)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	845,007,500
9)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	754,992,500
10)	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	400,000,000
11)	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1,120,000,000
12)	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	856,329,000
13)	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	1,774,850,000
14)	Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	340,000,000
s)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	
1)	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	6,371,534,901
2)	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	462,431,321
3)	Program Peningkatan Kerjasama	7,904,210,750
4)	Program Pembentukan Produk Hukum	3,985,603,250
5)	Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum	2,270,000,000
6)	Program Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum	1,724,000,000
7)	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian	18,987,567,000
8)	Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	13,659,236,000
9)	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA	5,800,000,000
10)	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	4,655,000,000
11)	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	25,942,712,555
12)	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	3,100,158,650
13)	Program Peningkatan Kualitas Media dan Dokumentasi	7,598,050,600
14)	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	4,100,158,650
15)	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	3,165,036,400

16)	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	3,500,000,000
17)	Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur	1,100,000,000
18)	Program Penataan Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik	1,200,000,000
19)	Program Dukungan Pelayanan Umum	369,500,000
20)	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	78,707,187,525
21)	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	14,983,448,916
22)	Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian	944,940,000
23)	Program Pendampingan SIDA Kab/Kota di Jawa Timur	336,762,229
24)	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,618,095,000
25)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1,173,890,000
26)	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	123,665,000
27)	Program Pencegahan Korupsi	614,490,000
28)	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	12,568,005,000
29)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	41,727,533,290
30)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	39,421,105,450
31)	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	5,525,270,000
32)	Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan	1,384,980,000
33)	Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	15,938,852,500
34)	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	4,557,254,000
35)	Program pengembangan Data Informasi	1,789,678,934
36)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,403,502,900
37)	Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur	4,266,497,100
38)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74,102,346,000
39)	Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur	6,841,500,000
40)	Program Pembinaan anggota KORPRI dan kelembagaan unit KORPRI	7,230,153,250
t)	Ketahanan Pangan	
1)	Program Peningkatan Ketahanan pangan	37,711,900,000
2)	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan	14,610,021,517
3)	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	32,609,500,000

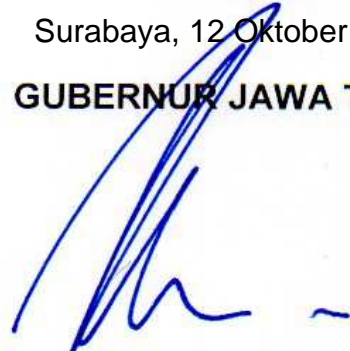
u)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
1)	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4,042,857,050
2)	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pemanfaatan TTG dan Pendayagunaan SDA	4,385,813,280
3)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	16,092,757,100
4)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	10,100,602,721
v)	Kearsipan	
1)	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	583,000,000
2)	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	2,091,640,000
3)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	648,000,000
w)	Komunikasi dan Informatika	
1)	Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1,671,788,000
2)	Program Pengembangan Teknologi Informatika	1,744,092,600
3)	Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)	6,999,700,000
4)	Program Pos dan Telekomunikasi	908,563,000
5)	Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi	3,341,691
6)	Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi	1,374,697,500
7)	Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi	1,374,697,500
8)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran	295,265,000
9)	Program Fasilitasi KPID	1,533,125,500
x)	Perpustakaan	
1)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	17,074,466,700
2. Urusan Pilihan		
a)	Pertanian	
1)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	68,805,314,500
2)	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	52,813,370,000
3)	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian	12,650,000,000
4)	Program peningkatan Produksi Perkebunan	74,257,190,000
5)	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	
6)	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	

7)	Program peningkatan Produksi Peternakan	81,324,410,000
8)	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	1,000,000,000
9)	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan	2,500,000,000
b)	Kehutanan	
1)	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	13,217,860,000
2)	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	10,274,622,000
3)	Program Rehabilitasi Sumber Daya Hutan	638,000,000
c)	Energi dan Sumberdaya Mineral	
1)	Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	4,280,000,000
2)	Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas.	4,300,000,000
3)	Program Pengelolaan Air Tanah.	4,350,000,000
4)	Program Pengembangan Sumber daya Geologi dan Bencana Geologi.	1,500,000,000
d)	Pariwisata	
1)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6,260,800,000
2)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,442,581,600
3)	Program Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataaan	5,287,420,000
e)	Kelautan dan Perikanan	
1)	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	113,600,000,000
2)	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	210,166,325,160
3)	Program peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan	14,000,000,000
4)	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan	30,325,160,000
5)	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	30,000,000,000
6)	Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat	15,000,000,000
f)	Perdagangan	
1)	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	44,537,095,000
2)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	23,421,200,000
3)	Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	16,225,000,000
g)	Industri	
1)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	10,707,751,000
2)	Program Penataan Struktur Industri	2,450,000,000
3)	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri	22,622,455,000
4)	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3,903,236,500
5)	Program Peningkatan Standarisasi Industri	9,430,504,000

6) Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	9,950,000,000
h) Ketransmigrasian	
1) Program Ketransmigrasian	7,950,000,000

Surabaya, 12 Oktober 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR



Dr. H. SOEKARWO